

KELAS MENENGAH INDONESIA: MENYUSUT, BERTAHAN, ATAU BERTRANSFORMASI?

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Kelas menengah adalah motor konsumsi, basis pajak, penggerak inovasi, dan penyangga stabilitas sosial. Namun tekanan ekonomi, biaya hidup, perubahan pekerjaan, dan ketidakpastian global menguji daya tahannya.



1. FOTO KELAS MENENGAH INDONESIA (Sept 2024) (Persentase Penduduk)



“Kelas menengah hanya 17,25% dari total penduduk, sementara hampir setengah penduduk masih berada di ambang menuju kelas menengah.”

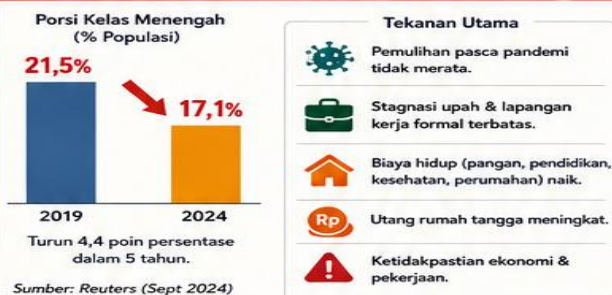
Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia Sept 2024

2. PERAN KELAS MENENGAH BAGI EKONOMI



Sumber: Reuters (2024), BPS, World Bank

3. TREN: MENYUSUT ATAU TERTEKAN?



4. STRATEGI KELAS MENENGAH BERTAHAN



5. KELAS MENENGAH YANG BERTRANSFORMASI



6. TANTANGAN STRUKTURAL



7. AGENDA KEBIJAKAN: MEMPERKUAT & MEMPERLUAS KELAS MENENGAH



8. DAMPAK JIKA KELAS MENENGAH KUAT



“Masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas kelas menengahnya. Perkuat hari ini, untuk Indonesia Emas 2045 yang maju, adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.”

— Rudy C Tarumingkeng

9. INDONESIA 2045: PILIHAN KITA HARI INI



PRINSIP UTAMA



Inklusif & Adil



Perlindungan Sosial



Inovasi & Produktivitas



Keberkelanjutan Lingkungan



Kerja Sama & Diplomasi



Tata Kelola Baik



Bersama membangun kelas menengah Indonesia yang kuat, produktif, dan berdaya saing.

*Rudy C Tarumingkeng: Kelas Menengah Indonesia - Menyusut,
Bertahan, atau Bertransformasi*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

8 Juni 2026

Sebagai pijakan konteks, isu kelas menengah Indonesia kini sangat penting karena menyangkut daya beli, konsumsi rumah tangga, basis pajak, stabilitas sosial, serta peluang Indonesia keluar dari middle-income trap. BPS mencatat bahwa pada September 2024 komposisi penduduk Indonesia terdiri dari 8,57% miskin, 24,42% rentan miskin, 49,29% menuju kelas menengah, 17,25% kelas menengah, dan 0,46% kelas atas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Reuters melaporkan bahwa porsi kelas menengah turun dari 21,5% populasi pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024; konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB, sementara kelas menengah menyumbang hampir 40% konsumsi swasta, dan jika digabung dengan aspiring middle class mencapai lebih dari 80%. ([Reuters](#)) Dalam konteks 2026, BPS mencatat ekonomi triwulan I-2026 tumbuh 5,61% yoy, dengan konsumsi rumah tangga sebagai sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,94 poin persentase; TPT Februari 2026 sebesar 4,68%, dan Gini Ratio September 2025 sebesar 0,363. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

KELAS MENENGAH INDONESIA: MENYUSUT, BERTAHAN, ATAU BERTRANSFORMASI?

Abstrak

Kelas menengah merupakan salah satu kelompok sosial-ekonomi paling strategis dalam pembangunan Indonesia. Ia bukan hanya kelompok konsumen yang menopang permintaan domestik, tetapi juga basis pajak,

sumber kewirausahaan, pendorong pendidikan, penyangga stabilitas sosial, dan aktor penting dalam demokrasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul kekhawatiran bahwa kelas menengah Indonesia mengalami tekanan. Sebagian data menunjukkan penyusutan jumlah kelas menengah, sementara kelompok “menuju kelas menengah” atau *aspiring middle class* tetap sangat besar tetapi rentan turun kembali ke kelompok miskin atau rentan miskin ketika terjadi guncangan ekonomi. Artikel ini membahas pertanyaan utama: apakah kelas menengah Indonesia sedang menyusut, bertahan, atau bertransformasi? Dengan pendekatan ekonomi politik dan analisis pembangunan, artikel ini menelaah definisi kelas menengah, dinamika konsumsi, pasar kerja, inflasi, biaya hidup, pendidikan, kesehatan, perumahan, digitalisasi, perubahan struktur pekerjaan, dan implikasinya terhadap Indonesia Emas 2045. Artikel ini berargumen bahwa kelas menengah Indonesia tidak dapat dibaca secara tunggal. Sebagian memang mengalami penyusutan daya beli dan mobilitas turun, terutama akibat tekanan pekerjaan formal, biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi. Sebagian lain bertahan melalui adaptasi konsumsi, ekonomi informal, dan strategi keluarga. Namun, terdapat pula kelompok yang sedang bertransformasi menjadi kelas menengah digital, kreatif, fleksibel, dan berbasis keterampilan baru. Masa depan kelas menengah Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat perlindungan sosial adaptif, menurunkan biaya dasar kehidupan, memperluas akses pendidikan-kesehatan bermutu, dan membangun ekonomi produktif yang tidak hanya bertumpu pada komoditas. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia tidak cukup hanya “menyelamatkan” kelas menengah, tetapi harus memperluas dan mentransformasikannya menjadi kelas menengah produktif, inovatif, berdaya beli, dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Kata Kunci

Kelas menengah; Indonesia; daya beli; konsumsi rumah tangga; aspiring middle class; middle-income trap; pekerjaan formal; mobilitas sosial; transformasi digital; Indonesia Emas 2045; ketimpangan; perlindungan sosial.

1. Pendahuluan

Kelas menengah selalu menempati posisi penting dalam pembangunan ekonomi modern. Di satu sisi, kelas menengah adalah kelompok konsumen yang memiliki daya beli relatif stabil. Mereka membeli makanan berkualitas, pakaian, kendaraan, rumah, pendidikan, kesehatan, hiburan, teknologi digital, jasa keuangan, pariwisata, dan produk gaya hidup. Di sisi lain, kelas menengah juga merupakan kelompok yang membayar pajak, menabung, berinvestasi, mendirikan usaha, menyekolahkan anak, menggunakan layanan keuangan, dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu, keberadaan kelas menengah bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena sosial, politik, dan budaya.

Dalam konteks Indonesia, kelas menengah sering dianggap sebagai motor pertumbuhan ekonomi domestik. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Ketika kelas menengah kuat, konsumsi relatif stabil, dunia usaha memiliki pasar, penerimaan pajak meningkat, dan peluang investasi membesar. Sebaliknya, ketika kelas menengah tertekan, dampaknya terasa luas: restoran sepi, penjualan kendaraan turun, kredit konsumsi melemah, pasar properti tertahan, pendidikan swasta tertekan, dan industri ritel mengalami perlambatan.

Namun, beberapa tahun terakhir muncul istilah yang semakin sering digunakan dalam percakapan publik: "kelas menengah turun kelas." Istilah ini menggambarkan kelompok rumah tangga yang sebelumnya merasa cukup aman secara ekonomi, tetapi kemudian mengalami tekanan akibat kehilangan pekerjaan, stagnasi pendapatan, kenaikan biaya hidup, cicilan,

biaya pendidikan, biaya kesehatan, inflasi pangan, dan ketidakpastian pekerjaan. Sebagian keluarga masih tampak “kelas menengah” secara gaya hidup, tetapi fondasi ekonominya rapuh. Mereka memiliki ponsel pintar, kendaraan, dan akses digital, tetapi tabungan terbatas. Mereka dapat membayar sekolah anak, tetapi dengan mengurangi pengeluaran lain. Mereka tidak miskin, tetapi mudah jatuh ketika menghadapi PHK, sakit, gagal usaha, atau kenaikan harga.

Pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah: apakah kelas menengah Indonesia benar-benar menyusut, atau sebenarnya sedang bertahan dan bertransformasi? Jawaban atas pertanyaan ini penting karena menyangkut arah pembangunan nasional. Jika kelas menengah menyusut, maka Indonesia menghadapi risiko melemahnya konsumsi, basis pajak, stabilitas sosial, dan dukungan terhadap reformasi. Jika kelas menengah bertahan, maka diperlukan kebijakan untuk memperkuat daya tahannya. Jika kelas menengah bertransformasi, maka negara harus menyiapkan sistem pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan ekonomi digital yang mampu mendukung transformasi tersebut.

Artikel ini membahas kelas menengah Indonesia dari perspektif ekonomi politik. Kelas menengah tidak hanya dilihat sebagai kelompok statistik berdasarkan pengeluaran, tetapi sebagai kelompok sosial yang hidup dalam struktur ekonomi, pasar kerja, kebijakan negara, budaya konsumsi, teknologi digital, dan dinamika mobilitas sosial. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya bertanya “berapa jumlah kelas menengah?”, tetapi juga “bagaimana kualitas kehidupannya, apa sumber kerentanannya, dan bagaimana masa depannya?”

2. Memahami Konsep Kelas Menengah

Kelas menengah adalah konsep yang tampak sederhana tetapi sebenarnya kompleks. Dalam percakapan sehari-hari, kelas menengah sering dipahami sebagai kelompok yang “tidak miskin tetapi juga tidak kaya.” Mereka

memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, membeli beberapa barang tahan lama, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta memiliki aspirasi untuk mobilitas sosial. Namun, dalam kajian akademik, definisi kelas menengah dapat berbeda-beda.

Secara ekonomi, kelas menengah sering didefinisikan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran per kapita. Pendekatan ini berguna karena dapat diukur melalui survei rumah tangga. Bank Dunia, misalnya, membagi kelompok sosial-ekonomi dalam beberapa kategori: miskin, rentan, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas. Pendekatan ini menekankan tingkat keamanan konsumsi. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga, semakin kecil kemungkinan mereka jatuh miskin akibat guncangan.

Namun, kelas menengah tidak hanya soal pengeluaran. Ada pula pendekatan sosiologis yang melihat kelas menengah berdasarkan pekerjaan, pendidikan, gaya hidup, status sosial, nilai budaya, dan aspirasi. Seorang guru, pegawai negeri, perawat, teknisi, pegawai bank, pekerja profesional, pemilik UMKM, dosen, karyawan swasta, atau pekerja kreatif dapat merasa sebagai kelas menengah bukan hanya karena pendapatan, tetapi juga karena pendidikan, pekerjaan, dan identitas sosialnya.

Ada pula pendekatan politik yang melihat kelas menengah sebagai aktor demokrasi. Kelas menengah sering dianggap lebih menuntut pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang baik, kepastian hukum, dan kebebasan sipil. Namun, asumsi ini tidak selalu berlaku universal. Kelas menengah dapat mendukung demokrasi bila merasa aman dan memiliki kepentingan terhadap rule of law. Tetapi ketika merasa terancam secara ekonomi, sebagian kelas menengah dapat mendukung populisme, proteksionisme, atau kebijakan yang menjanjikan stabilitas cepat.

Dalam konteks Indonesia, kelas menengah perlu dipahami dalam tiga lapisan. Pertama, kelas menengah mapan, yaitu mereka yang relatif aman secara ekonomi, memiliki tabungan, aset, pendidikan baik, pekerjaan stabil, dan akses layanan berkualitas. Kedua, kelas menengah rentan, yaitu mereka

yang secara pengeluaran masuk kelas menengah tetapi mudah terguncang oleh PHK, sakit, cicilan, inflasi, atau biaya pendidikan. Ketiga, kelas menuju menengah atau *aspiring middle class*, yaitu kelompok yang sudah keluar dari kemiskinan tetapi belum benar-benar aman. Kelompok ketiga ini sangat besar di Indonesia dan menjadi kunci masa depan pembangunan.

Dengan demikian, pertanyaan "kelas menengah menyusut atau bertahan?" tidak cukup dijawab dengan satu angka. Yang lebih penting adalah memahami mobilitas antar-kelompok: siapa yang naik kelas, siapa yang turun kelas, siapa yang tertahan, dan apa faktor yang menentukan pergerakan tersebut.

3. Kelas Menengah sebagai Motor Konsumsi Nasional

Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Berbeda dari beberapa negara Asia Timur yang tumbuh sangat kuat melalui ekspor manufaktur, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar. Jumlah penduduk yang besar membuat konsumsi menjadi mesin utama ekonomi. Dalam struktur seperti ini, kelas menengah memiliki peran sentral.

Kelas menengah membeli barang dan jasa dalam jumlah besar. Mereka menjadi pasar bagi ritel modern, restoran, transportasi, otomotif, properti, pendidikan swasta, layanan kesehatan, internet, telekomunikasi, hiburan, pariwisata, keuangan, dan ekonomi digital. Mereka juga mendorong pertumbuhan UMKM karena banyak usaha kecil hidup dari belanja kelas menengah: warung makan, kafe, jasa laundry, kursus anak, toko daring, salon, bengkel, dan usaha rumahan.

Namun, konsumsi kelas menengah tidak hanya penting secara kuantitatif. Konsumsi mereka juga menciptakan perubahan struktural. Ketika pendapatan naik, pola konsumsi bergeser dari kebutuhan dasar menuju kebutuhan kualitas: makanan sehat, pendidikan lebih baik, perumahan layak, asuransi, rekreasi, teknologi, dan pengalaman. Pergeseran ini

menciptakan sektor ekonomi baru. Kelas menengah mendorong pertumbuhan jasa, ekonomi kreatif, e-commerce, fintech, pariwisata, dan pendidikan.

Masalah muncul ketika konsumsi kelas menengah melemah. Pelemahan ini dapat terjadi bukan hanya karena pendapatan turun, tetapi juga karena ekspektasi memburuk. Kelas menengah yang merasa tidak aman akan menunda pembelian besar seperti rumah, kendaraan, perabot, pendidikan mahal, atau liburan. Mereka lebih memilih menabung, membayar utang, atau mengurangi pengeluaran diskresioner. Dampaknya terasa pada sektor usaha.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak rumah tangga kelas menengah menghadapi tekanan biaya hidup. Harga pangan, sewa, cicilan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan digital meningkat. Walaupun inflasi umum dapat terlihat terkendali, inflasi yang dirasakan kelas menengah bisa berbeda. Misalnya, biaya sekolah dan kesehatan sering naik lebih cepat daripada inflasi umum. Begitu pula cicilan rumah atau kendaraan dapat meningkat ketika suku bunga naik.

Karena itu, daya beli kelas menengah harus dipahami sebagai kombinasi antara pendapatan, biaya hidup, utang, tabungan, dan rasa aman. Kelas menengah yang pendapatannya tetap tetapi biaya hidupnya naik akan mengalami penurunan daya beli riil. Kelas menengah yang masih mampu berbelanja tetapi tidak punya tabungan akan terlihat bertahan, tetapi sebenarnya rentan.

4. Apakah Kelas Menengah Indonesia Menyusut?

Pertanyaan apakah kelas menengah Indonesia menyusut perlu dijawab dengan hati-hati. Berdasarkan data dan laporan yang tersedia, terdapat indikasi bahwa porsi kelas menengah mengalami penurunan setelah pandemi. Sebagian kelompok yang sebelumnya masuk kelas menengah

turun menjadi kelompok menuju kelas menengah. Ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial tidak selalu naik; ada mobilitas turun.

Penyusutan kelas menengah dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, pandemi COVID-19 menciptakan guncangan besar pada pekerjaan, pendapatan, dan usaha kecil. Banyak pekerja mengalami PHK, pengurangan jam kerja, atau penurunan pendapatan. Banyak UMKM kehilangan pelanggan. Meskipun ekonomi pulih, tidak semua rumah tangga pulih pada kecepatan yang sama.

Kedua, pasar kerja formal belum tumbuh cukup kuat. Kelas menengah biasanya membutuhkan pekerjaan formal yang stabil, memiliki upah layak, jaminan sosial, dan prospek karier. Jika pekerjaan yang tersedia lebih banyak bersifat informal, sementara upah stagnan, maka sulit bagi rumah tangga untuk naik kelas. Mereka bekerja, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk membangun keamanan ekonomi.

Ketiga, sebagian investasi yang masuk ke Indonesia berada di sektor padat modal, seperti pertambangan dan industri berbasis sumber daya alam. Sektor ini dapat meningkatkan PDB dan ekspor, tetapi tidak selalu menciptakan pekerjaan berkualitas dalam jumlah besar. Jika pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan banyak pekerjaan formal, kelas menengah sulit berkembang.

Keempat, industri manufaktur padat karya menghadapi tekanan. Tekstil, alas kaki, dan beberapa sektor manufaktur menghadapi persaingan impor, perubahan permintaan global, biaya produksi, dan otomasi. Ketika pabrik tutup atau melakukan efisiensi, pekerja yang sebelumnya memiliki pendapatan stabil dapat turun ke sektor informal.

Kelima, biaya dasar kehidupan meningkat. Rumah tangga kelas menengah menghadapi tekanan biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan kebutuhan digital. Mereka mungkin tidak masuk kategori miskin, tetapi semakin sulit membangun aset. Jika seluruh pendapatan habis untuk konsumsi rutin, kelas menengah kehilangan daya tahan.

Namun, penyusutan kelas menengah tidak berarti seluruh kelas menengah Indonesia runtuh. Sebagian tetap bertahan, terutama mereka yang memiliki pekerjaan stabil di sektor formal, usaha yang adaptif, aset produktif, atau keterampilan digital. Yang terjadi adalah polarisasi: kelas menengah yang kuat dapat tetap maju, sementara kelas menengah rentan turun mendekati kelompok aspiring.

Dengan demikian, istilah “menyusut” benar dalam arti statistik tertentu, tetapi perlu dilengkapi dengan analisis kualitas. Masalah terbesar bukan hanya jumlah kelas menengah yang turun, tetapi rapuhnya fondasi kelas menengah Indonesia.

5. Kelas Menengah yang Bertahan: Strategi Rumah Tangga

Meskipun menghadapi tekanan, banyak keluarga kelas menengah Indonesia tetap bertahan. Mereka bertahan bukan karena tidak merasakan tekanan, tetapi karena melakukan penyesuaian. Strategi bertahan ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama, rumah tangga mengubah pola konsumsi. Mereka mengurangi pengeluaran hiburan, menunda liburan, memilih merek lebih murah, beralih ke belanja diskon, memasak di rumah, atau mengurangi makan di luar. Konsumsi tidak hilang, tetapi berubah menjadi lebih hati-hati. Inilah yang sering disebut *downtrading*: konsumen tetap membeli, tetapi memilih produk lebih murah.

Kedua, keluarga menambah sumber pendapatan. Banyak pekerja kelas menengah mencari pekerjaan sampingan, membuka toko daring, menjadi freelancer, mengajar les, menjadi pengemudi daring, menjual makanan, atau memanfaatkan platform digital. Ekonomi gig memberi peluang pendapatan tambahan, tetapi juga mencerminkan ketidakcukupan pendapatan utama.

Ketiga, keluarga menggunakan jaringan sosial. Bantuan orang tua, saudara, komunitas gereja/masjid, arisan, koperasi, dan jejaring informal sering menjadi penyangga. Dalam masyarakat Indonesia, keluarga besar masih menjadi sistem perlindungan sosial informal. Namun, sistem ini juga memiliki batas. Jika terlalu banyak anggota keluarga tertekan, jaringan sosial ikut melemah.

Keempat, rumah tangga mengatur ulang prioritas. Pendidikan anak sering tetap menjadi prioritas utama. Banyak keluarga rela mengurangi konsumsi lain demi sekolah anak. Ini menunjukkan bahwa kelas menengah memiliki aspirasi mobilitas antargenerasi. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah jalan agar anak memiliki masa depan lebih baik.

Kelima, sebagian keluarga menggunakan utang. Kredit kendaraan, kartu kredit, paylater, pinjaman daring, dan cicilan konsumsi dapat membantu menjaga gaya hidup, tetapi juga dapat menjadi sumber kerentanan. Jika utang digunakan untuk kebutuhan produktif, dampaknya dapat positif. Tetapi jika utang digunakan untuk menutup konsumsi rutin, risiko keuangan rumah tangga meningkat.

Strategi bertahan ini menunjukkan daya adaptasi kelas menengah Indonesia. Namun, bertahan tidak sama dengan sejahtera. Jika keluarga terus bertahan dengan mengurangi kualitas hidup, menambah jam kerja, atau berutang, maka mereka sebenarnya hidup dalam tekanan. Kebijakan publik perlu membantu agar strategi bertahan berubah menjadi strategi naik kelas.

6. Kelas Menengah yang Bertransformasi

Selain menyusut dan bertahan, sebagian kelas menengah Indonesia juga sedang bertransformasi. Transformasi ini terjadi karena digitalisasi, perubahan pekerjaan, pendidikan, gaya hidup, dan pola kewirausahaan. Kelas menengah baru tidak selalu berbentuk pegawai tetap dengan karier linear. Banyak yang bekerja sebagai profesional digital, pekerja kreatif,

entrepreneur, konsultan, freelancer, content creator, pengembang aplikasi, pemasar daring, analis data, guru online, atau pelaku UMKM digital.

Transformasi ini memiliki sisi positif. Digitalisasi membuka peluang bagi individu untuk menciptakan pendapatan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pekerjaan formal tradisional. Seorang anak muda di kota kecil dapat menjual produk melalui marketplace, menawarkan jasa desain kepada klien luar negeri, mengajar daring, membuat konten edukatif, atau membangun bisnis berbasis komunitas. Teknologi membuka peluang mobilitas sosial baru.

Namun, transformasi digital juga membawa risiko. Banyak pekerjaan digital bersifat tidak stabil, tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian pendapatan, dan sangat bergantung pada algoritma platform. Pekerja gig dapat memperoleh pendapatan, tetapi tidak selalu memiliki perlindungan. Content creator dapat sukses, tetapi pendapatannya tidak pasti. Pedagang marketplace dapat menjangkau pasar luas, tetapi menghadapi biaya iklan, perang harga, dan ketergantungan pada platform.

Kelas menengah digital juga menghadapi tekanan keterampilan. Mereka harus terus belajar: pemasaran digital, analisis data, desain, komunikasi, bahasa asing, penggunaan AI, manajemen keuangan, keamanan digital, dan branding. Mereka yang mampu belajar cepat akan naik kelas. Mereka yang tertinggal akan semakin tertekan.

Transformasi lain terjadi dalam nilai dan gaya hidup. Kelas menengah muda cenderung lebih sadar teknologi, lingkungan, kesehatan mental, fleksibilitas kerja, dan pengalaman. Mereka tidak selalu mengejar simbol kelas menengah lama seperti rumah besar atau pekerjaan seumur hidup. Sebagian lebih memilih fleksibilitas, mobilitas, dan pekerjaan bermakna. Namun, nilai baru ini tetap berhadapan dengan realitas ekonomi: harga rumah tinggi, biaya pendidikan mahal, dan pasar kerja tidak pasti.

Oleh karena itu, kelas menengah Indonesia tidak hanya menyusut. Ia juga berubah bentuk. Negara perlu memahami transformasi ini agar kebijakan

tidak hanya dirancang untuk model kelas menengah lama, tetapi juga untuk kelas menengah digital, kreatif, fleksibel, dan berbasis keterampilan.

7. Pasar Kerja: Titik Kritis Kelas Menengah

Masa depan kelas menengah sangat bergantung pada pasar kerja. Kelas menengah tidak dapat berkembang hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan pekerjaan yang produktif, formal, stabil, dan berupah layak. Tanpa pekerjaan berkualitas, kelompok miskin sulit naik kelas, kelompok menuju menengah sulit menjadi aman, dan kelas menengah rentan turun kelas.

Indonesia menghadapi tantangan pasar kerja yang kompleks. Pengangguran terbuka mungkin menurun, tetapi kualitas pekerjaan belum tentu membaik secara merata. Banyak orang bekerja di sektor informal. Banyak pekerja muda masuk pekerjaan gig tanpa perlindungan. Banyak lulusan perguruan tinggi menghadapi ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Banyak pekerja manufaktur menghadapi risiko PHK akibat kompetisi global dan otomasi.

Pekerjaan formal penting karena memberi stabilitas. Dengan pekerjaan formal, rumah tangga lebih mudah mengakses kredit perumahan, asuransi, jaminan sosial, dan perencanaan masa depan. Pekerjaan informal dapat memberi pendapatan, tetapi sering tidak stabil. Ketidakstabilan ini membuat rumah tangga sulit membangun aset.

Masalah lain adalah stagnasi upah. Jika upah tidak naik seiring produktivitas dan biaya hidup, kelas menengah akan tertekan. Pekerja dapat tetap bekerja, tetapi daya belinya menurun. Untuk memperkuat kelas menengah, Indonesia perlu menciptakan pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Artinya, struktur ekonomi harus bergerak dari sektor berupah rendah menuju industri dan jasa bernilai tambah tinggi.

Pendidikan vokasi dan reskilling menjadi penting. Dunia kerja berubah karena digitalisasi, AI, otomasi, energi bersih, dan perubahan rantai pasok. Pekerja harus memiliki keterampilan baru. Namun, tanggung jawab peningkatan keterampilan tidak boleh hanya dibebankan kepada individu. Negara, perusahaan, perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan platform digital harus membangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat.

Jika Indonesia gagal menciptakan pekerjaan berkualitas, kelas menengah akan terus rapuh. Jika berhasil, kelas menengah dapat menjadi motor pertumbuhan dan stabilitas.

8. Biaya Hidup: Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan

Kelas menengah sering tidak miskin secara statistik, tetapi rentan karena biaya dasar kehidupan tinggi. Tiga biaya paling menentukan adalah pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Pendidikan adalah aspirasi utama kelas menengah. Orang tua kelas menengah rela berkorban demi sekolah anak. Mereka percaya pendidikan adalah jalan naik kelas. Namun, biaya pendidikan berkualitas sering tinggi. Sekolah swasta, les tambahan, kursus bahasa, bimbingan belajar, perangkat digital, transportasi, dan biaya kuliah dapat menyerap sebagian besar pendapatan keluarga. Jika pendidikan publik berkualitas tidak merata, kelas menengah dipaksa membeli pendidikan di pasar.

Kesehatan juga menjadi sumber kerentanan. Sistem jaminan kesehatan nasional sangat membantu, tetapi kelas menengah masih menghadapi biaya obat, layanan tambahan, antrean, kualitas fasilitas, dan kebutuhan kesehatan tertentu. Penyakit kronis dalam keluarga dapat mengguncang keuangan rumah tangga. Banyak keluarga yang tidak miskin dapat menjadi rentan akibat biaya kesehatan.

Perumahan menjadi masalah besar, terutama di kota. Harga rumah di wilayah produktif sering naik lebih cepat daripada pendapatan. Kelas

menengah muda sulit membeli rumah dekat tempat kerja. Mereka menghadapi pilihan: menyewa, membeli rumah jauh dari pusat kota, atau mengambil KPR jangka panjang. Biaya transportasi kemudian meningkat. Akibatnya, sebagian kelas menengah terjebak dalam beban cicilan dan perjalanan panjang.

Ketiga biaya ini menunjukkan bahwa memperkuat kelas menengah tidak cukup dengan menaikkan pendapatan. Negara juga harus menurunkan biaya dasar kehidupan melalui layanan publik berkualitas. Pendidikan publik yang baik, layanan kesehatan yang andal, transportasi umum yang layak, perumahan terjangkau, dan lingkungan kota yang manusiawi adalah kebijakan kelas menengah.

Jika negara gagal menyediakan layanan dasar berkualitas, kelas menengah harus membeli semuanya dari pasar. Akibatnya, pendapatan mereka habis untuk kebutuhan dasar, bukan untuk tabungan, investasi, atau konsumsi produktif. Kelas menengah menjadi tampak modern tetapi rapuh.

9. Kelas Menengah dan Utang Konsumtif

Perkembangan layanan keuangan digital membuka akses kredit yang lebih luas. Kartu kredit, paylater, pinjaman online, kredit kendaraan, KPR, dan cicilan marketplace menjadi bagian dari kehidupan kelas menengah. Akses kredit dapat membantu rumah tangga membeli aset, membiayai pendidikan, membuka usaha, atau mengelola arus kas. Namun, kredit juga dapat menjadi jebakan jika digunakan untuk mempertahankan konsumsi di tengah pendapatan yang stagnan.

Utang konsumtif menjadi tanda kerentanan jika digunakan untuk menutup kebutuhan rutin. Misalnya, keluarga menggunakan paylater untuk belanja bulanan, kartu kredit untuk biaya sekolah, atau pinjaman online untuk membayar cicilan lain. Dalam kondisi seperti ini, utang bukan alat produktif, melainkan mekanisme bertahan. Risiko meningkat ketika bunga tinggi dan literasi keuangan rendah.

Kelas menengah sangat sensitif terhadap suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban KPR, kredit kendaraan, dan pinjaman usaha. Di sisi lain, inflasi membuat pengeluaran naik. Kombinasi biaya hidup tinggi dan cicilan dapat menekan konsumsi.

Literasi keuangan menjadi kebutuhan penting. Kelas menengah perlu memahami perencanaan keuangan, dana darurat, asuransi, investasi, risiko utang, dan prioritas belanja. Namun, literasi keuangan bukan solusi tunggal. Jika pendapatan tidak cukup dan biaya hidup terlalu tinggi, nasihat keuangan tidak akan menyelesaikan masalah struktural.

Regulasi pinjaman digital juga penting. Layanan keuangan digital harus melindungi konsumen dari bunga berlebihan, penagihan tidak etis, penyalahgunaan data, dan praktik predatory lending. Kelas menengah digital membutuhkan perlindungan konsumen digital yang kuat.

Utang dapat membantu kelas menengah naik kelas jika digunakan untuk aset produktif. Tetapi utang dapat mempercepat turun kelas jika digunakan untuk konsumsi yang tidak sebanding dengan pendapatan. Kebijakan publik perlu mendorong kredit produktif dan membatasi praktik kredit konsumtif berisiko.

10. Kelas Menengah, Pajak, dan Kontrak Sosial

Kelas menengah adalah basis penting penerimaan negara. Mereka membayar pajak penghasilan, PPN, pajak kendaraan, pajak properti, cukai, retribusi, dan berbagai biaya layanan. Karena itu, kelas menengah memiliki hubungan langsung dengan kontrak sosial: mereka membayar negara dan mengharapkan layanan publik yang sepadan.

Masalah muncul ketika kelas menengah merasa membayar banyak tetapi tidak memperoleh layanan berkualitas. Mereka membayar pajak, tetapi tetap harus membayar sekolah swasta, rumah sakit swasta, keamanan kompleks, air minum, transportasi pribadi, dan berbagai layanan yang

seharusnya dapat disediakan negara dengan baik. Jika persepsi ini menguat, kepatuhan pajak dan kepercayaan publik dapat melemah.

Kontrak sosial yang sehat membutuhkan dua sisi. Dari sisi warga, kelas menengah perlu patuh pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dari sisi negara, pemerintah perlu menyediakan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi pertukaran kepercayaan. Warga bersedia membayar jika percaya uang publik dikelola dengan baik.

Kelas menengah juga memiliki peran politik dalam mendorong tata kelola. Mereka lebih terdidik, lebih terhubung secara digital, dan lebih mampu menyuarakan aspirasi. Mereka dapat menuntut pemerintahan bersih, pelayanan publik efektif, transparansi anggaran, dan kebijakan berbasis data. Namun, jika kelas menengah terlalu tertekan secara ekonomi, energi politik mereka dapat berubah menjadi frustrasi, sinisme, atau dukungan pada solusi populis.

Karena itu, memperkuat kelas menengah bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga agenda demokrasi. Kelas menengah yang aman, terdidik, dan percaya pada institusi dapat menjadi penyangga demokrasi. Kelas menengah yang rapuh dan kecewa dapat menjadi sumber ketidakstabilan sosial.

11. Kelas Menengah dan Middle-Income Trap

Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045. Untuk mencapai tujuan itu, Indonesia harus keluar dari middle-income trap. Jebakan pendapatan menengah terjadi ketika suatu negara berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi gagal naik menjadi negara berpendapatan tinggi karena produktivitas, inovasi, dan struktur industrinya tidak cukup kuat.

Kelas menengah memiliki hubungan erat dengan middle-income trap. Di satu sisi, kelas menengah yang besar dapat mendorong permintaan

domestik, pendidikan, investasi, dan reformasi. Di sisi lain, kelas menengah yang rapuh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup berkualitas. Jika banyak orang sulit naik kelas atau mudah turun kelas, berarti struktur ekonomi belum menciptakan keamanan sosial yang luas.

Negara yang berhasil menjadi negara maju biasanya memiliki kelas menengah yang kuat. Kelas menengah tersebut lahir dari pekerjaan formal, industrialisasi, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, perumahan, dan sistem perlindungan sosial. Mereka bukan hanya konsumen, tetapi juga pekerja produktif dan warga negara aktif.

Indonesia tidak dapat mencapai Indonesia Emas 2045 hanya dengan pertumbuhan PDB sekitar 5% jika pertumbuhan itu tidak memperluas kelas menengah. Pertumbuhan harus menghasilkan pekerjaan yang baik. Hilirisasi harus menciptakan nilai tambah dan keterampilan lokal. Digitalisasi harus meningkatkan produktivitas, bukan hanya konsumsi aplikasi. Investasi harus menciptakan lapangan kerja, bukan hanya output padat modal. Pendidikan harus meningkatkan kemampuan kerja, bukan hanya jumlah ijazah.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa besar PDB, tetapi berapa banyak keluarga yang naik menjadi kelas menengah aman dan berapa banyak kelas menengah yang mampu bertahan menghadapi guncangan. Jika kelas menengah menyusut, maka target negara maju menjadi lebih sulit.

12. Kelas Menengah di Kota dan Daerah

Kelas menengah Indonesia banyak terkonsentrasi di kota, terutama di Jawa dan wilayah metropolitan. Kota menyediakan pekerjaan formal, pendidikan tinggi, rumah sakit, transportasi, pasar modern, dan peluang usaha. Namun, kota juga memiliki biaya hidup tinggi. Perumahan mahal, kemacetan, polusi, biaya sekolah, dan biaya transportasi menekan kelas menengah perkotaan.

Di kota besar, banyak keluarga kelas menengah mengalami paradoks: pendapatan relatif lebih tinggi, tetapi biaya hidup juga jauh lebih tinggi. Mereka memiliki pekerjaan dan akses layanan, tetapi kualitas hidup tertekan oleh waktu perjalanan, cicilan rumah, biaya sekolah, dan stres kerja. Kelas menengah kota sering hidup dalam “keamanan semu”: tampak mapan, tetapi tabungan terbatas.

Di daerah, kelas menengah memiliki karakter berbeda. Mereka dapat terdiri dari ASN, guru, pegawai BUMD, pedagang, petani komersial, pemilik UMKM, pekerja tambang, pekerja perkebunan, atau pelaku jasa lokal. Biaya hidup mungkin lebih rendah, tetapi peluang pekerjaan berkualitas juga lebih terbatas. Banyak anak muda daerah harus pindah ke kota untuk pendidikan dan pekerjaan.

Pemerataan kelas menengah membutuhkan pembangunan wilayah. Jika peluang ekonomi hanya terkonsentrasi di kota besar, urbanisasi akan terus menekan perkotaan. Indonesia perlu membangun pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, memperkuat kota menengah, mengembangkan agroindustri, ekonomi maritim, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital daerah.

Kelas menengah daerah juga penting bagi stabilitas nasional. Mereka menjadi penggerak ekonomi lokal, pemimpin komunitas, pelaku UMKM, dan pengguna layanan publik. Jika kelas menengah daerah tumbuh, pembangunan menjadi lebih merata.

13. Gender, Keluarga, dan Kelas Menengah

Kelas menengah tidak dapat dipahami tanpa melihat peran keluarga dan gender. Dalam banyak keluarga Indonesia, perempuan memegang peran penting dalam mengatur keuangan rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan keluarga, konsumsi, dan usaha kecil. Banyak perempuan kelas menengah juga bekerja sebagai guru, pegawai, tenaga kesehatan, pekerja kantor, wirausaha, freelancer, atau pelaku UMKM.

Partisipasi ekonomi perempuan dapat memperkuat kelas menengah. Dua sumber pendapatan dalam keluarga meningkatkan daya tahan rumah tangga. Namun, perempuan sering menghadapi beban ganda: bekerja di luar rumah sekaligus mengurus rumah, anak, orang tua, dan pekerjaan domestik. Jika layanan penitipan anak, transportasi, jam kerja fleksibel, dan dukungan keluarga tidak memadai, partisipasi perempuan terhambat.

Kelas menengah juga menghadapi tekanan dalam membesarkan anak. Biaya pendidikan, gizi, kesehatan, perangkat digital, dan lingkungan sosial menjadi perhatian utama. Orang tua kelas menengah sering merasa harus berinvestasi besar pada anak agar tidak tertinggal. Ini menciptakan tekanan psikologis dan finansial.

Kebijakan publik yang ramah keluarga dapat memperkuat kelas menengah. Pendidikan anak usia dini, layanan kesehatan ibu-anak, cuti orang tua, daycare terjangkau, transportasi aman, ruang publik, dan perlindungan pekerja perempuan sangat penting. Jika keluarga kelas menengah harus menanggung seluruh biaya reproduksi sosial sendiri, daya tahannya menurun.

Transformasi kelas menengah Indonesia juga akan ditentukan oleh kemampuan negara mendukung keluarga sebagai unit dasar pembangunan. Kelas menengah yang kuat bukan hanya individu berpendapatan cukup, tetapi keluarga yang mampu merencanakan masa depan dengan aman.

14. Pendidikan sebagai Jalan Naik Kelas

Pendidikan adalah jalan klasik mobilitas sosial. Banyak keluarga kelas menengah Indonesia lahir dari generasi orang tua yang berinvestasi pada pendidikan anak. Anak petani menjadi guru, anak pedagang menjadi dokter, anak buruh menjadi pegawai bank, anak nelayan menjadi insinyur. Cerita mobilitas seperti ini menjadi inti harapan kelas menengah.

Namun, pendidikan sebagai jalan naik kelas menghadapi tantangan. Pertama, kualitas pendidikan tidak merata. Sekolah unggul sering terkonsentrasi di kota dan membutuhkan biaya tambahan. Kedua, pasar kerja berubah cepat. Ijazah tidak lagi menjamin pekerjaan. Ketiga, biaya pendidikan tinggi semakin berat. Keempat, keterampilan yang dibutuhkan industri sering tidak sesuai dengan kurikulum.

Kelas menengah sangat sensitif terhadap kualitas pendidikan. Mereka tidak hanya ingin anak lulus, tetapi ingin anak kompetitif. Karena itu, mereka membeli les, kursus bahasa, bimbingan belajar, perangkat digital, dan pendidikan nonformal. Ini menciptakan ketimpangan baru: anak keluarga mampu memperoleh dukungan tambahan, sementara anak keluarga rentan tertinggal.

Untuk memperluas kelas menengah, pendidikan publik harus menjadi instrumen pemerataan. Sekolah negeri harus berkualitas, guru harus diperkuat, pendidikan vokasi harus relevan, perguruan tinggi harus terhubung dengan riset dan industri, dan pembelajaran digital harus inklusif. Pendidikan tidak boleh menjadi beban finansial yang terlalu berat bagi keluarga.

Pendidikan masa depan juga harus mengajarkan keterampilan abad ke-21: literasi, numerasi, sains, teknologi, AI, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, etika, dan adaptabilitas. Kelas menengah masa depan bukan hanya mereka yang memiliki ijazah, tetapi mereka yang mampu terus belajar.

15. Kesehatan Mental dan Tekanan Kelas Menengah

Pembahasan kelas menengah sering fokus pada pendapatan dan konsumsi, tetapi tekanan psikologis juga penting. Banyak keluarga kelas menengah hidup dalam ketegangan antara aspirasi dan kemampuan. Mereka ingin rumah layak, pendidikan baik, kesehatan terjamin, gaya hidup

pantas, dan masa depan anak yang lebih baik. Namun, pendapatan tidak selalu cukup.

Tekanan ini menciptakan stres finansial. Orang tua khawatir tentang cicilan, biaya sekolah, pekerjaan, kesehatan, dan masa depan. Anak muda kelas menengah menghadapi tekanan karier, persaingan kerja, ekspektasi keluarga, harga rumah, dan ketidakpastian ekonomi. Media sosial memperkuat perbandingan sosial: orang merasa harus terlihat sukses, produktif, dan bahagia.

Kesehatan mental menjadi isu kelas menengah modern. Stres kerja, burnout, kecemasan finansial, dan ketidakpastian masa depan dapat menurunkan produktivitas. Namun, akses layanan kesehatan mental masih terbatas dan sering mahal. Stigma juga masih kuat.

Kebijakan kelas menengah perlu memasukkan dimensi kesejahteraan psikologis. Lingkungan kerja sehat, jam kerja manusiawi, jaminan sosial, akses konseling, ruang publik, transportasi yang baik, dan kepastian ekonomi dapat mengurangi tekanan. Kelas menengah yang sehat secara mental akan lebih produktif dan kreatif.

16. Politik Kelas Menengah: Antara Rasionalitas, Aspirasi, dan Kekecewaan

Kelas menengah adalah aktor politik penting. Mereka memiliki akses informasi, pendidikan, media sosial, dan kemampuan menyuarakan pendapat. Mereka dapat mendukung reformasi, antikorupsi, pelayanan publik, dan demokrasi. Namun, kelas menengah juga dapat menjadi kelompok yang mudah kecewa ketika aspirasi ekonominya terhambat.

Ketika kelas menengah tumbuh, mereka biasanya menuntut kualitas pemerintahan yang lebih baik. Mereka ingin birokrasi cepat, pajak adil, sekolah baik, transportasi layak, keamanan, lingkungan bersih, dan korupsi

rendah. Mereka tidak hanya meminta bantuan, tetapi meminta negara bekerja efektif. Ini dapat memperkuat good governance.

Namun, ketika kelas menengah merasa turun kelas, mereka dapat kehilangan kepercayaan pada institusi. Mereka merasa bekerja keras tetapi tidak maju. Mereka melihat biaya hidup naik, lapangan kerja sulit, dan masa depan tidak pasti. Dalam kondisi seperti ini, kelas menengah dapat menjadi lahan subur bagi populisme, politik kemarahan, atau narasi anti-elite.

Karena itu, memperkuat kelas menengah adalah agenda stabilitas demokrasi. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kerja keras masih dapat menghasilkan mobilitas sosial. Jika masyarakat percaya bahwa pendidikan, pekerjaan, dan usaha dapat membawa perbaikan hidup, stabilitas sosial lebih kuat. Jika mobilitas sosial macet, frustrasi kolektif meningkat.

Kelas menengah juga perlu memainkan peran konstruktif. Mereka dapat menjadi warga aktif, pembayar pajak patuh, pengawas kebijakan, pelaku UMKM, inovator, dan penggerak komunitas. Kelas menengah yang hanya menjadi konsumen tidak cukup; Indonesia membutuhkan kelas menengah yang produktif dan partisipatif.

17. Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah Rentan

Perlindungan sosial di Indonesia sering diarahkan pada kelompok miskin. Ini penting dan harus terus dilakukan. Namun, kelompok kelas menengah rentan juga membutuhkan perlindungan adaptif. Mereka mungkin tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, tetapi dapat jatuh ketika menghadapi guncangan: PHK, sakit, bencana, perceraian, gagal usaha, atau krisis ekonomi.

Perlindungan sosial masa depan harus lebih dinamis. Sistem harus mampu mengenali kerentanan sebelum rumah tangga jatuh miskin. Data sosial-ekonomi perlu diperbarui, terintegrasi, dan responsif. Bantuan tidak boleh

hanya berdasarkan status kemiskinan statis, tetapi juga risiko dan guncangan.

Instrumen perlindungan untuk kelas menengah rentan dapat mencakup asuransi pengangguran, pelatihan ulang, bantuan pencarian kerja, subsidi pendidikan sementara, perlindungan kesehatan, restrukturisasi kredit saat krisis, bantuan UMKM, dan jaminan sosial pekerja informal. Tujuannya bukan membuat kelas menengah bergantung pada bantuan, tetapi mencegah mobilitas turun yang permanen.

Dalam pasar kerja modern yang lebih fleksibel, perlindungan sosial harus mengikuti orang, bukan hanya pekerjaan formal. Pekerja gig, freelancer, pekerja kontrak, dan pelaku UMKM perlu akses jaminan sosial. Jika tidak, transformasi digital akan menciptakan kelas menengah baru yang tampak bebas tetapi sangat rentan.

Perlindungan sosial adaptif juga penting untuk menjaga konsumsi. Ketika rumah tangga mengalami guncangan, bantuan sementara dapat mencegah penurunan konsumsi drastis, menjaga anak tetap sekolah, dan mencegah penjualan aset produktif. Dengan demikian, perlindungan sosial bukan hanya kebijakan kesejahteraan, tetapi juga stabilisator ekonomi.

18. Tiga Skenario Masa Depan Kelas Menengah Indonesia

Masa depan kelas menengah Indonesia dapat dibayangkan dalam tiga skenario.

Skenario pertama adalah penyusutan berlanjut. Dalam skenario ini, pekerjaan formal tidak tumbuh cukup, biaya hidup meningkat, industri padat karya melemah, pendidikan mahal, dan perlindungan sosial tidak adaptif. Banyak keluarga kelas menengah turun menjadi aspiring middle class. Konsumsi melemah, basis pajak menyempit, dan frustrasi sosial meningkat. Ini adalah skenario yang harus dihindari.

Skenario kedua adalah bertahan tanpa lompatan. Dalam skenario ini, kelas menengah tidak runtuh, tetapi juga tidak berkembang kuat. Mereka bertahan melalui adaptasi konsumsi, pekerjaan sampingan, bantuan keluarga, dan digitalisasi terbatas. Ekonomi tumbuh sekitar 5%, tetapi mobilitas sosial lambat. Indonesia tidak krisis, tetapi sulit melompat menjadi negara maju. Ini adalah skenario moderat.

Skenario ketiga adalah transformasi produktif. Dalam skenario ini, Indonesia berhasil menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat manufaktur dan jasa modern, menurunkan biaya dasar kehidupan, memperluas pendidikan-kesehatan bermutu, membangun perlindungan sosial adaptif, dan memanfaatkan ekonomi digital. Kelas menengah tumbuh, lebih produktif, lebih inovatif, dan lebih tahan guncangan. Ini adalah skenario yang diharapkan.

Pilihan skenario tidak ditentukan oleh nasib, tetapi oleh kebijakan. Kelas menengah tidak akan tumbuh otomatis hanya karena PDB naik. Ia membutuhkan strategi pembangunan yang berpusat pada pekerjaan, produktivitas, layanan publik, dan mobilitas sosial.

19. Strategi Kebijakan untuk Memperkuat Kelas Menengah

Ada beberapa strategi utama untuk memperkuat kelas menengah Indonesia.

Pertama, menciptakan pekerjaan formal berkualitas. Pemerintah perlu mendorong sektor manufaktur, jasa modern, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan industri kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja berupah layak. Investasi harus dinilai bukan hanya dari nilai modal, tetapi juga dari penciptaan pekerjaan dan transfer keterampilan.

Kedua, memperkuat pendidikan dan vokasi. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan. SMK, politeknik, perguruan

tinggi, dan pelatihan kerja harus terhubung dengan industri. Reskilling dan upskilling harus menjadi hak pekerja sepanjang hayat.

Ketiga, menurunkan biaya dasar kehidupan. Pendidikan publik, kesehatan, transportasi, perumahan, dan layanan kota harus lebih berkualitas dan terjangkau. Ini akan meningkatkan pendapatan riil kelas menengah.

Keempat, memperluas perlindungan sosial adaptif. Sistem jaminan sosial harus mencakup pekerja informal, gig worker, freelancer, dan UMKM. Asuransi pengangguran dan pelatihan ulang perlu diperkuat.

Kelima, memperkuat UMKM produktif. UMKM harus naik kelas melalui digitalisasi, pembiayaan, sertifikasi, manajemen, akses pasar, dan integrasi rantai pasok. UMKM yang produktif dapat menjadi sumber kelas menengah baru.

Keenam, mengatur kredit konsumtif dan memperkuat literasi keuangan. Layanan keuangan digital harus sehat, transparan, dan melindungi konsumen. Dana darurat, asuransi, dan investasi produktif perlu didorong.

Ketujuh, memperkuat kota menengah dan ekonomi daerah. Pusat pertumbuhan baru dapat mengurangi tekanan kota besar dan memperluas peluang kelas menengah di daerah.

Kedelapan, membangun sistem pajak yang adil dan layanan publik yang sepadan. Kelas menengah akan lebih mendukung pajak jika melihat manfaat nyata dalam layanan publik.

Kesembilan, memperkuat data sosial-ekonomi. Pemerintah perlu memantau mobilitas kelas, bukan hanya kemiskinan. Data yang baik memungkinkan kebijakan pencegahan turun kelas.

Kesepuluh, membangun ekonomi berbasis produktivitas. Indonesia harus bergerak dari ekonomi komoditas dan pekerjaan murah menuju inovasi, teknologi, manufaktur, jasa modern, dan ekonomi hijau.

20. Kesimpulan

Kelas menengah Indonesia berada dalam persimpangan. Sebagian menyusut secara statistik dan mengalami tekanan daya beli. Sebagian bertahan melalui adaptasi konsumsi, pekerjaan tambahan, jaringan keluarga, dan strategi rumah tangga. Sebagian lain bertransformasi menjadi kelas menengah digital, kreatif, dan fleksibel. Karena itu, pertanyaan “menyusut, bertahan, atau bertransformasi?” tidak memiliki satu jawaban tunggal. Ketiganya terjadi secara bersamaan.

Namun, kecenderungan paling penting adalah meningkatnya kerentanan. Banyak keluarga tidak miskin, tetapi belum aman. Banyak yang bekerja, tetapi pendapatannya tidak cukup stabil. Banyak yang mengakses layanan digital, tetapi tidak memiliki perlindungan sosial. Banyak yang menyekolahkan anak, tetapi terbebani biaya. Banyak yang mempertahankan gaya hidup kelas menengah, tetapi tanpa tabungan memadai.

Kelas menengah adalah fondasi Indonesia Emas 2045. Tanpa kelas menengah yang kuat, konsumsi domestik melemah, basis pajak terbatas, demokrasi rapuh, dan mobilitas sosial terhambat. Indonesia tidak cukup hanya mengurangi kemiskinan; Indonesia harus memperluas keamanan ekonomi. Pembangunan harus memastikan bahwa kelompok miskin dapat naik menjadi aspiring middle class, aspiring middle class dapat naik menjadi kelas menengah, dan kelas menengah tidak mudah turun kelas.

Masa depan kelas menengah Indonesia bergantung pada kualitas pekerjaan, produktivitas, layanan publik, pendidikan, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, dan transformasi digital yang inklusif. Negara perlu membangun ekonomi yang memberi kesempatan nyata bagi kerja keras untuk menghasilkan kehidupan lebih baik. Dunia usaha perlu menciptakan pekerjaan bermutu dan meningkatkan produktivitas. Perguruan tinggi perlu menyiapkan manusia yang adaptif. Masyarakat perlu memperkuat literasi, keterampilan, dan solidaritas.

Dengan kebijakan yang tepat, kelas menengah Indonesia tidak harus menyusut. Ia dapat bertahan dan bertransformasi menjadi kelas menengah baru yang lebih produktif, inovatif, berdaya tahan, dan berperan aktif dalam pembangunan nasional. Kelas menengah yang kuat bukan hanya tanda kemakmuran; ia adalah syarat bagi Indonesia yang maju, adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Glossarium

Aspiring Middle Class

Kelompok menuju kelas menengah, yaitu penduduk yang sudah keluar dari kemiskinan tetapi belum memiliki keamanan ekonomi yang cukup kuat untuk disebut kelas menengah mapan.

Biaya Hidup

Jumlah pengeluaran yang diperlukan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sosial, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi.

Daya Beli

Kemampuan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa berdasarkan pendapatan yang dimiliki setelah memperhitungkan harga dan inflasi.

Digital Middle Class

Kelas menengah yang memperoleh pendapatan, identitas sosial, dan peluang ekonomi melalui teknologi digital, platform daring, pekerjaan kreatif, dan keterampilan berbasis data.

Downtrading

Perubahan perilaku konsumsi ketika rumah tangga beralih ke produk atau layanan yang lebih murah untuk menyesuaikan dengan tekanan pendapatan atau harga.

Ekonomi Gig

Sistem kerja berbasis tugas atau proyek jangka pendek, sering melalui platform digital, seperti pengemudi daring, freelancer, kurir, desainer, atau pekerja lepas.

Formal Employment

Pekerjaan formal yang biasanya memiliki kontrak kerja, upah tetap, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan struktur karier.

Gini Ratio

Indikator ketimpangan pengeluaran atau pendapatan, dengan nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Kelas Menengah

Kelompok sosial-ekonomi yang memiliki pengeluaran atau pendapatan di atas kelompok rentan, relatif aman dari kemiskinan, dan memiliki kapasitas konsumsi, pendidikan, serta aspirasi mobilitas sosial.

Kelas Menengah Rentan

Bagian dari kelas menengah yang secara statistik tidak miskin, tetapi mudah turun kelas akibat guncangan seperti PHK, sakit, inflasi, atau krisis usaha.

Mobilitas Sosial

Pergerakan individu atau rumah tangga dari satu posisi sosial-ekonomi ke posisi lain, baik naik maupun turun.

Middle-Income Trap

Kondisi ketika suatu negara mencapai pendapatan menengah tetapi gagal naik menjadi negara berpendapatan tinggi karena produktivitas dan inovasi tidak berkembang cukup cepat.

Perlindungan Sosial Adaptif

Sistem perlindungan sosial yang mampu merespons perubahan risiko dan

guncangan secara cepat, termasuk bagi kelompok rentan yang belum miskin.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau lebih bernilai dengan input yang sama atau lebih efisien.

Reskilling

Pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru agar seseorang dapat beralih ke pekerjaan atau sektor baru.

Stagnasi Upah

Kondisi ketika upah tidak meningkat secara berarti dalam jangka waktu tertentu, terutama bila dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup.

Upward Mobility

Mobilitas sosial naik, yaitu ketika individu atau rumah tangga berhasil meningkatkan status sosial-ekonomi.

Vulnerable Group

Kelompok rentan yang berada di atas garis kemiskinan tetapi memiliki risiko tinggi jatuh miskin ketika terjadi guncangan ekonomi.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In O. Ashenfelter & D. Card (Eds.), *Handbook of Labor Economics* (Vol. 4B, pp. 1043–1171). Elsevier.
[https://doi.org/10.1016/S0169-7218\(11\)02410-5](https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02410-5)

Asian Development Bank. (2010). *The rise of Asia's middle class*. Asian Development Bank.

Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Memahami perbedaan angka kemiskinan Bank Dunia dan BPS*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. BPS-Statistics Indonesia.

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2008). What is middle class about the middle classes around the world? *Journal of Economic Perspectives*, 22(2), 3–28.
<https://doi.org/10.1257/jep.22.2.3>

Birdsall, N. (2010). The indispensable middle class in developing countries; or, the rich and the rest, not the poor and the rest. *Center for Global Development Working Paper No. 207*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1681115>

Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Chun, N. (2010). Middle class size in the past, present, and future: A description of trends in Asia. *Asian Development Bank Economics Working Paper Series No. 217*. Asian Development Bank.

Easterly, W. (2001). The middle class consensus and economic development. *Journal of Economic Growth*, 6, 317–335.
<https://doi.org/10.1023/A:1012786330095>

Ferreira, F. H. G., Messina, J., Rigolini, J., López-Calva, L. F., Lugo, M. A., & Vakis, R. (2013). *Economic mobility and the rise of the Latin American middle class*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9634-6>

Fields, G. S. (2011). *Working hard, working poor: A global journey*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199794643.001.0001>

Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.

Goldthorpe, J. H. (2016). Social class mobility in modern Britain: Changing structure, constant process. *Journal of the British Academy*, 4, 89–111.
<https://doi.org/10.5871/jba/004.089>

Kharas, H. (2017). *The unprecedented expansion of the global middle class: An update*. Brookings Institution.

Kharas, H., & Gertz, G. (2010). *The new global middle class: A cross-over from West to East*. Brookings Institution.

López-Calva, L. F., & Ortiz-Juarez, E. (2014). A vulnerability approach to the definition of the middle class. *Journal of Economic Inequality*, 12, 23–47.
<https://doi.org/10.1007/s10888-012-9240-5>

Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Under pressure: The squeezed middle class*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/689afed1-en>

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674369542>

Ravallion, M. (2010). The developing world's bulging but vulnerable middle class. *World Development*, 38(4), 445–454.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.007>

Reuters. (2024). *Indonesia's dwindling middle class seen dimming economic outlook*. Reuters.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.

Torche, F. (2014). Intergenerational mobility and inequality: The Latin American case. *Annual Review of Sociology*, 40, 619–642.

<https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071811-145521>

World Bank. (2020). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. World Bank.

World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank.

World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects*. World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia country overview and economic prospects*. World Bank.

Catatan: beberapa sumber resmi seperti BPS, Reuters, World Bank, ADB, dan OECD adalah laporan institusional atau berita/data resmi sehingga tidak selalu memiliki DOI. DOI dicantumkan untuk artikel jurnal, buku akademik digital, dan laporan akademik yang memang menyediakannya.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 8 Juni 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a225a06-3f70-83ec-bc5e-1c93a8a5ed2e>